

Guru Besar Emeritus: Pemerataan atau Pengosongan Rumah Akademik?

24 Feb 2026, 10:26 WIB

Mengapa seorang guru besar tidak dapat tetap menyangand status emeritus di PTN asalnya, sambil berafiliasi dengan PTS?

Oleh **PROF KUSMARDI**; Ketua Komite Promosi dan Demosi Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

REPUBLIKA.ID; Terbitnya Permendikti Saintek Nomor 52 Tahun 2025 memantik diskursus serius di kalangan akademisi. Salah satu ketentuannya membuka peluang bagi Guru Besar perguruan tinggi negeri (PTN) yang telah memasuki usia pensiun 70 tahun untuk diangkat sebagai Guru Besar Emeritus di perguruan tinggi swasta (PTS).

Secara normatif, kebijakan ini tampak progresif. Pemerintah ingin mempercepat pemerataan kualitas pendidikan tinggi nasional. Distribusi Guru Besar memang belum merata. Banyak PTS yang menghadapi keterbatasan dalam memenuhi syarat pembukaan program doktoral atau meraih akreditasi unggul karena minimnya jumlah profesor.

Dalam konteks itu, kehadiran Guru Besar senior dari PTN tentu menjadi katalis percepatan mutu. Pengalaman panjang dalam riset, jejaring akademik, kepemimpinan ilmiah, serta budaya akademik yang matang dapat memperkuat ekosistem PTS dalam waktu relatif singkat. Namun kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat baiknya. Ia harus diuji dari implikasi jangka panjangnya terhadap sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan. Dan di sinilah pertanyaan mendasar muncul: apakah pemerataan harus dibayar dengan melemahnya rumah akademik yang telah membesarkan para Guru Besar tersebut?



Apabila regulasi hanya menyediakan ruang emeritus di PTS dan tidak memberi opsi serupa di PTN asalnya, maka secara simbolik muncul pertanyaan: di manakah posisi rumah akademik yang telah membesarkannya?

Investasi panjang yang terlupakan

Seorang Guru Besar bukanlah produk instan. Ia lahir melalui proses panjang: pendidikan lanjut, penelitian berkelanjutan, pembimbingan doktoral, kepemimpinan akademik, hingga reputasi ilmiah yang dibangun bertahun-tahun. Semua itu berlangsung dalam ekosistem institusi yang menopang dan memfasilitasi pertumbuhannya.

PTN menginvestasikan sumber daya signifikan—baik finansial, struktural, maupun kultural—untuk membentuk seorang dosen hingga mencapai jabatan tertinggi akademik. Tidak sedikit pula pembiayaan yang berasal dari dana publik. Ketika seorang Guru Besar memasuki usia pensiun, kontribusi keilmuannya sejatinya belum selesai.

Dalam banyak tradisi universitas dunia, status emeritus diberikan sebagai bentuk penghormatan sekaligus mekanisme menjaga kesinambungan tradisi ilmiah. Namun apabila regulasi hanya menyediakan ruang emeritus di PTS dan tidak memberi opsi serupa di PTN asalnya, maka secara simbolik muncul pertanyaan: di manakah posisi rumah akademik yang telah membesarkannya?



Emeritus: Penghormatan dan kontinuitas

Status emeritus bukan jabatan struktural dan bukan pula beban birokrasi. Ia adalah pengakuan atas dedikasi seumur hidup dan sekaligus instrumen menjaga kesinambungan keilmuan. Profesor emeritus sering menjadi mentor bagi dosen muda, rujukan dalam pengambilan kebijakan akademik, serta penjaga standar etik dan ilmiah.

Ia menyimpan memori institusional dan tradisi berpikir yang tidak mudah digantikan. Jika opsi emeritus di PTN tidak tersedia, maka yang terputus bukan sekadar status administratif, tetapi juga kesinambungan epistemik. Tradisi keilmuan berisiko kehilangan figur sentral yang selama ini menjadi penghubung antar generasi.

Tentu, tujuan pemerataan Guru Besar antara PTN dan PTS adalah visi yang patut didukung. Kesenjangan kualitas pendidikan tinggi harus diatasi. Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa akses terhadap pendidikan bermutu tersedia secara lebih merata. Namun pemerataan tidak harus menggunakan pendekatan *zero-sum*—seolah penguatan satu pihak mengurangi peran pihak lain.

Mengapa tidak diberikan opsi? Mengapa seorang Guru Besar tidak dapat tetap menyandang status emeritus di PTN asalnya, sambil menjalin afiliasi atau kolaborasi di PTS? Model afiliasi ganda merupakan praktik yang lazim dalam dunia akademik global. Dengan pendekatan kolaboratif, pemerataan tetap tercapai, tetapi kesinambungan tradisi ilmiah di institusi asal tidak terputus.

Ada pula dimensi moral yang tak boleh diabaikan. Bagi banyak akademisi, universitas bukan sekadar tempat bekerja. Ia adalah rumah intelektual—tempat membangun laboratorium, membina generasi, dan merintis pusat-pusat keilmuan. Ketika pada fase akhir pengabdian tidak tersedia ruang penghormatan di institusi sendiri, sementara peluang kontribusi formal justru dibuka di tempat lain, muncul kegamangan yang wajar.

Akademisi bekerja bukan hanya karena insentif, tetapi juga karena loyalitas dan pengakuan simbolik. Tradisi universitas dibangun atas relasi jangka panjang antara guru, murid, dan institusi.

Lebih dari sekadar angka

Pendidikan tinggi tidak sekadar tentang jumlah Guru Besar. Ia tentang tradisi ilmu, kesinambungan generasi, dan integritas akademik. Jika kebijakan terlalu berorientasi pada distribusi kuantitatif, kita berisiko melupakan dimensi kualitatif yang justru menjadi ruh universitas. Pemerataan adalah keniscayaan.

Tetapi menjaga rumah akademik tetap menjadi ruang terhormat bagi para ilmuwan senior juga merupakan tanggung jawab yang tidak kalah penting. Kebijakan yang baik bukan yang memaksa memilih antara pemerataan atau kontinuitas, melainkan yang mampu merancang keduanya berjalan beriringan. Karena pada akhirnya, universitas yang kuat bukan hanya yang memiliki banyak profesor, tetapi yang mampu merawat tradisi keilmuannya dari generasi ke generasi.

[guru besar emeritus](#)[opini](#)[tentang guru besar](#)[kampus](#)

A Syalaby Ichsan

Redaktur 